



KEYNOTE SPEECH DAN PEMBUKAAN

SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK
YANG BERKUALITAS UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG LEBIH BAIK**

Jakarta, 6 Desember 2017



OUTLINE

Kondisi dan Tantangan Ekonomi Global

Kondisi Ekonomi Indonesia

Tantangan Pembangunan Nasional

APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel

Tindak lanjut



CITA – CITA REPUBLIK INDONESIA

SAAT **INI**, KITA, sebagai **PENYELENGGARA NEGARA**
BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MAKIN MENDEKATKAN
TERWUJUDNYA TUJUAN BERNEGARA

Tujuan Negara :

- Melindungi segenap Bangsa dan Tanah tumpah darah
 - Memajukan Kesejahteraan Umum,
 - Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,
 - Ikut Melaksanakan Keterliban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial
- BERKUALITAS
 - SEHAT
 - PRUDENT
 - TRANSPARAN
 - AKUNTABEL

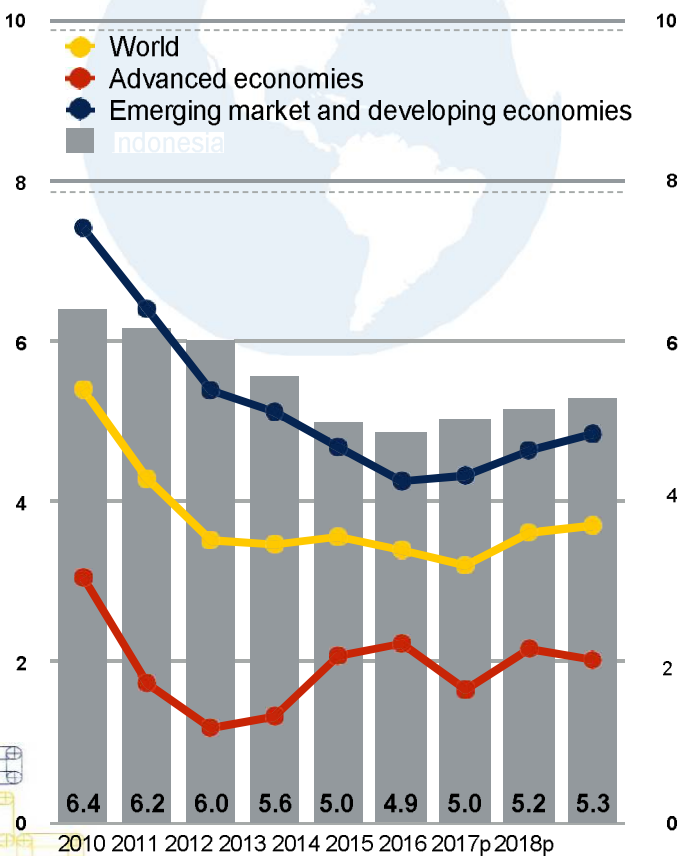
- **PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS**
 - **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR



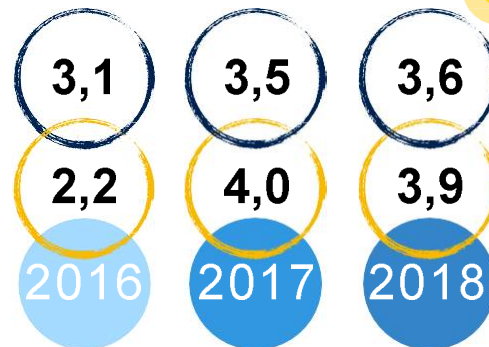
PEREKONOMIAN GLOBAL DI TAHUN 2018

DIPROYEKSIKAN TUMBUH MODERAT



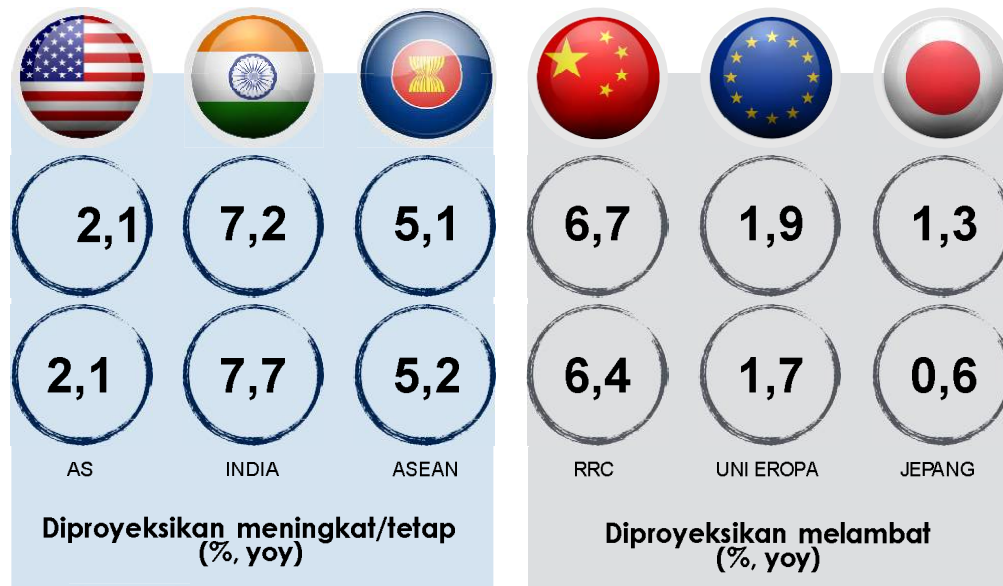
PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN VOL. PERDAGANGAN

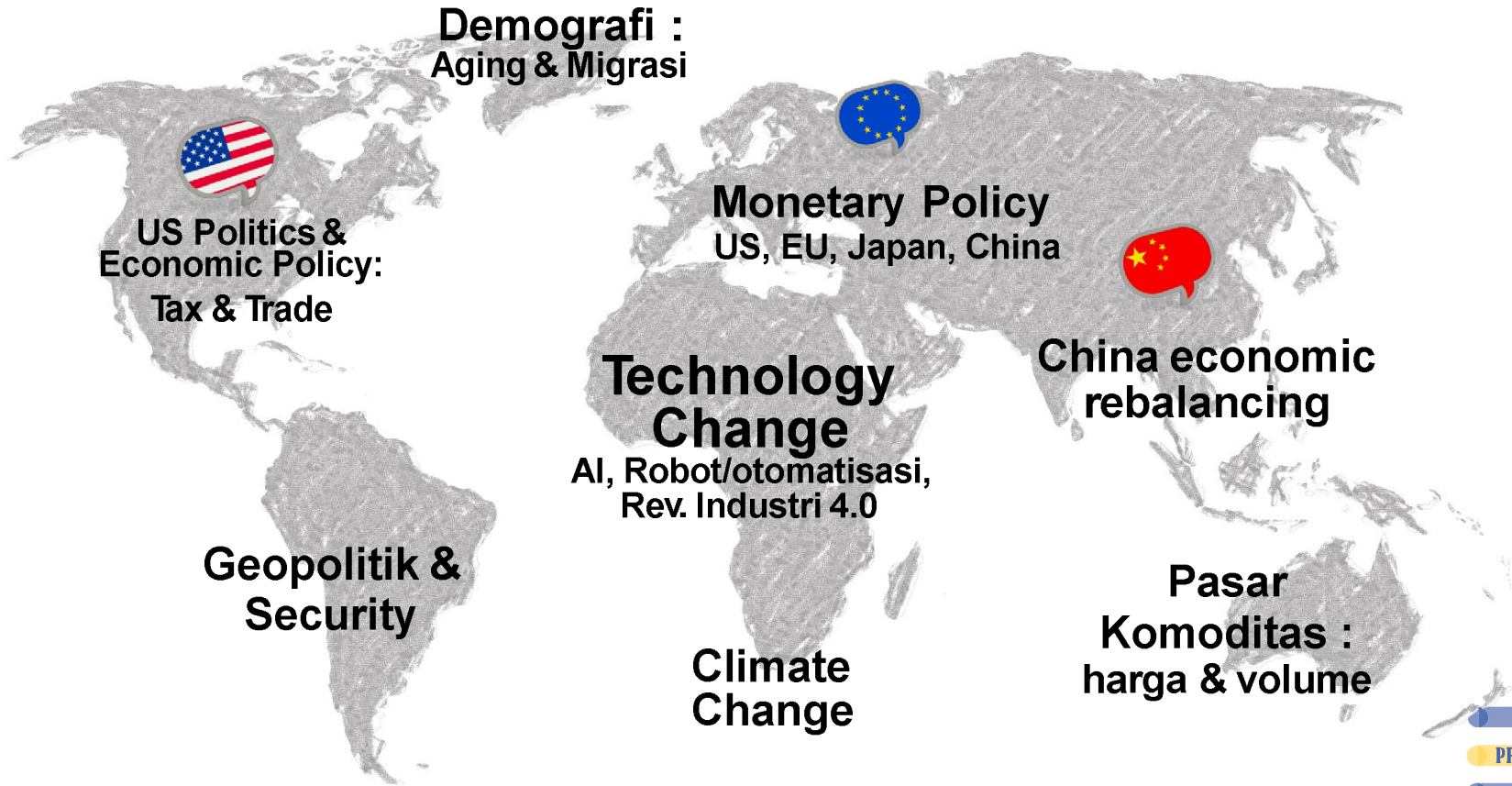
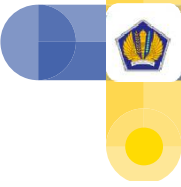


2017

2018



TANTANGAN DAN RISIKO EKONOMI GLOBAL



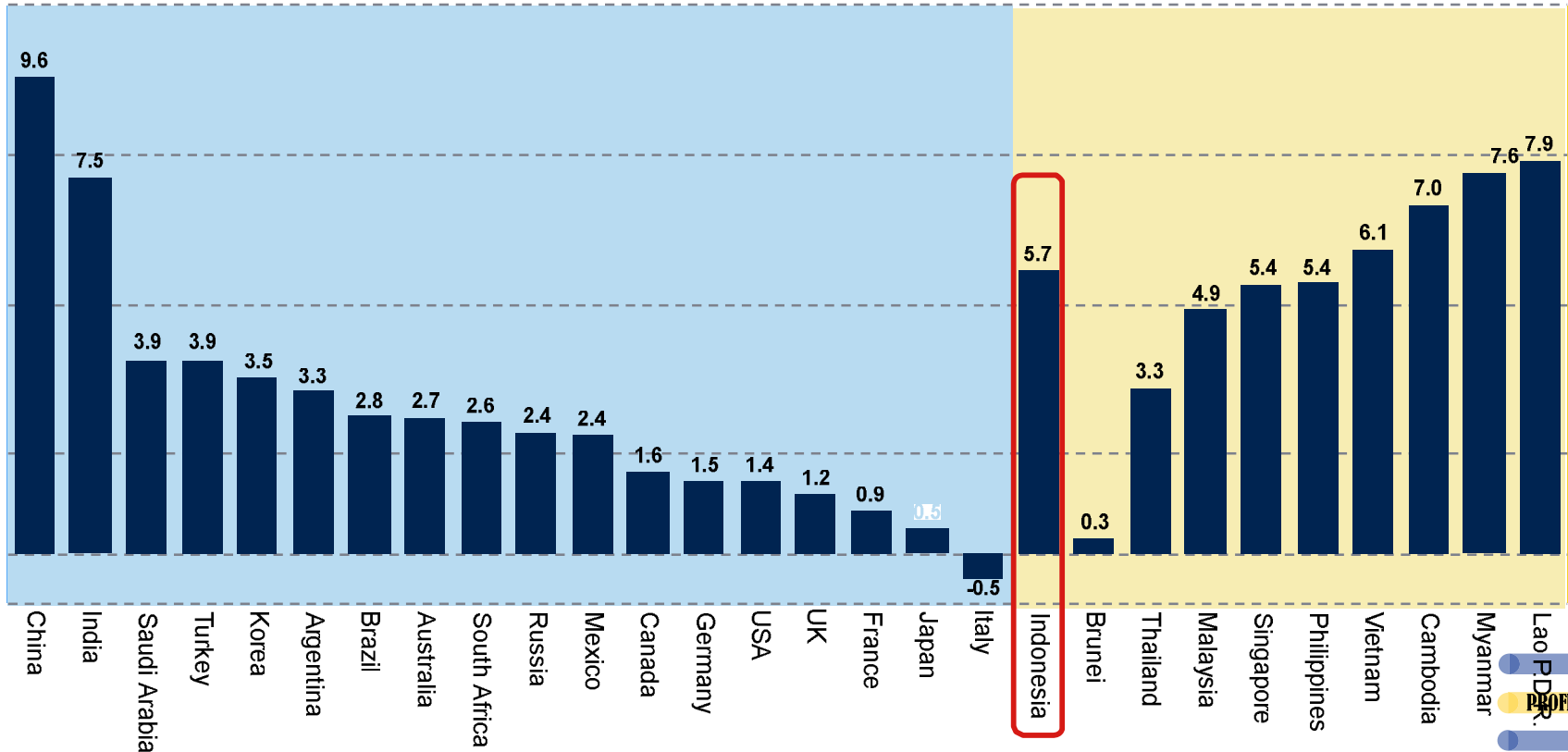
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MASIH LEBIH BAIK



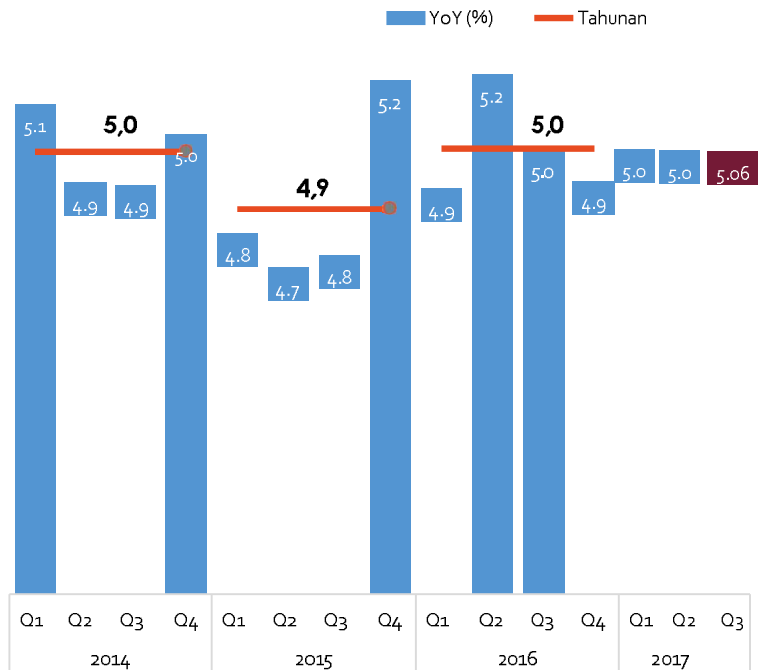
G20 & BRICS

Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (% ,yoy)

ASEAN



TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI SEHAT DAN STABIL



Sumber: BPS, diolah

Sisi Pengeluaran

Permintaan domestik masih menjadi motor

konsumsi RT tumbuh

5,0%

PMTB tumbuh **5,1%**

Kinerja perdagangan internasional positif, ekspor tumbuh 5,8% dan impor tumbuh 2,8%

Konsumsi Pemerintah tumbuh positif didorong oleh tingginya realisasi seluruh belanja, baik belanja pegawai (gaji 13), barang, dan bansos.

Sisi Produksi

Sektor primer tumbuh baik, dengan sektor pertambangan yang mencatatkan pertumbuhan positif

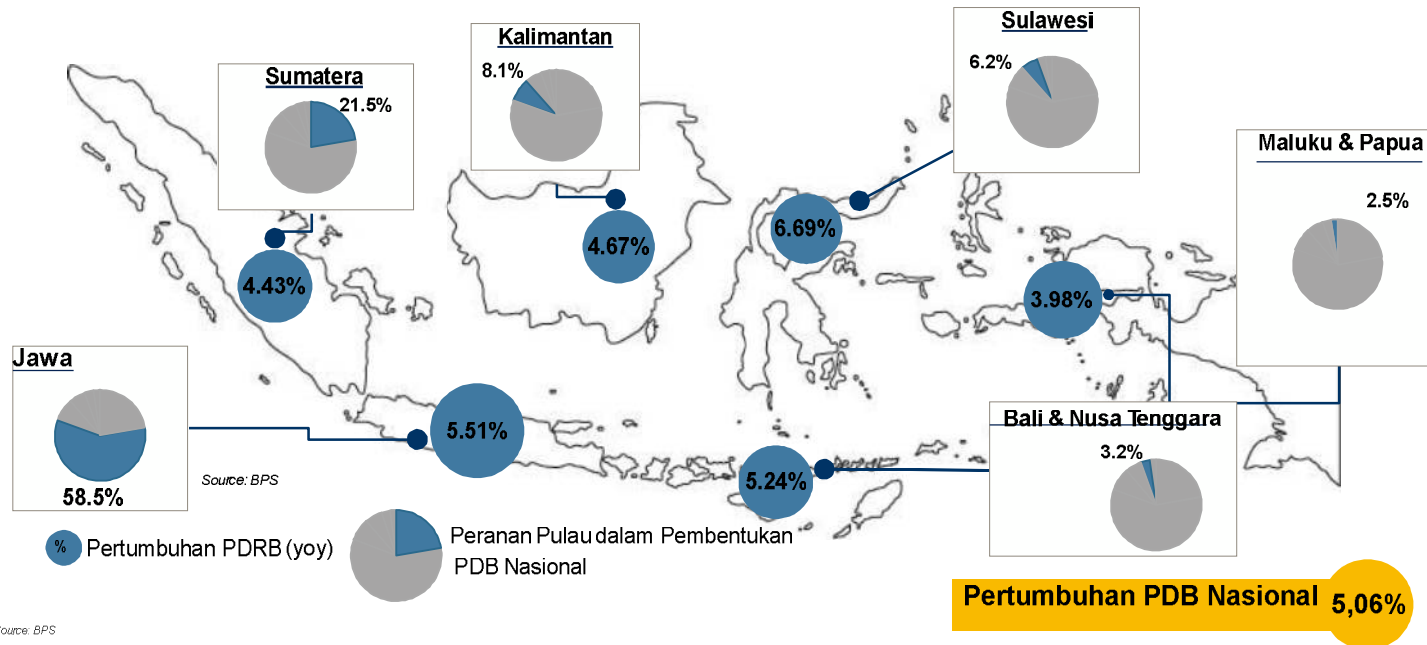
Sektor konstruksi tumbuh tinggi 6,5%, sejalan dengan akselerasi infrastruktur

Sektor jasa melanjutkan tren peningkatan terutama transportasi dan informatika, yang juga terdorong oleh percepatan infrastruktur

Sektor industri pengolahan tumbuh melambat 3,9%, menguatkan perlunya revitalisasi

PERTUMBUHAN EKONOMI Q3-2017 POSITIF DI SEMUA KAWASAN

...Jawa tumbuh stabil sejalan dengan pertumbuhan sektor industri...



- Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Jasa mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa
- Peningkatan aktivitas ekspor, khususnya untuk komoditas tambang dan pertanian mendukung pertumbuhan positif di kawasan Sumatera, Kalimantan, serta Maluku dan Papua

INDONESIA TELAH MENDAPAT PENGAKUAN ATAS REFORMASI EKONOMI & STRUKTURAL

CREDITWORTHINESS, DOING BUSINESS, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, HINGGA DAYA SAING



Ease of Doing Business 2018

naik
19
peringkat

Posisi Indonesia naik dari 91 menjadi 72. Perbaikan ini merupakan kelanjutan dari perbaikan 15 peringkat dari survey tahun sebelumnya. Saat ini posisi Indonesia berada di atas Tiongkok, India, Brazil, dan Philippines

Investment Grade dari Standard and Poor's

BBB-

Indonesia mendapat peringkat *investment grade* dari seluruh lembaga rating: S&P, Moody's dan Fitch.

Galup World Poll

#1

Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah

Global Competitiveness Index 2017-2018

naik
5
peringkat

Posisi Indonesia naik dari 41 menjadi 36. 9 dari 12 pilar penilaian mendapatkan kenaikan skor antar lain: *Institution, Infrastructure, macroeconomic, health and primary education, technological readiness, business sophistication*

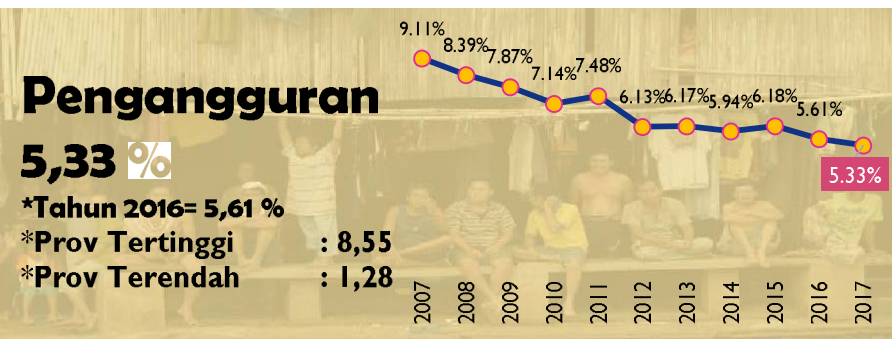
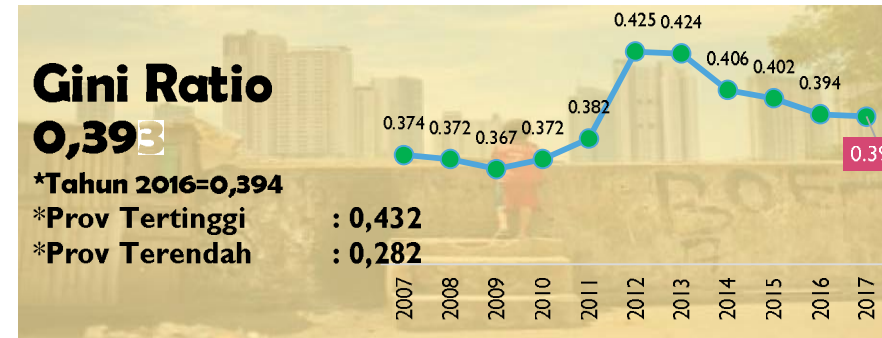
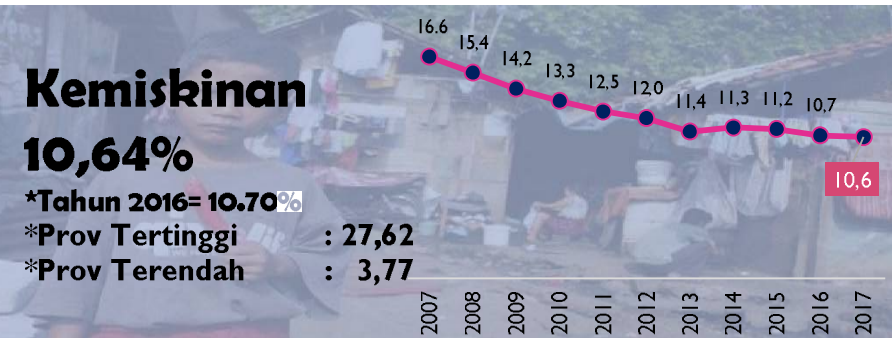
INTEGRITA

PROFESIONALISM

SINERG

PELAYANA

KESEMPURNA

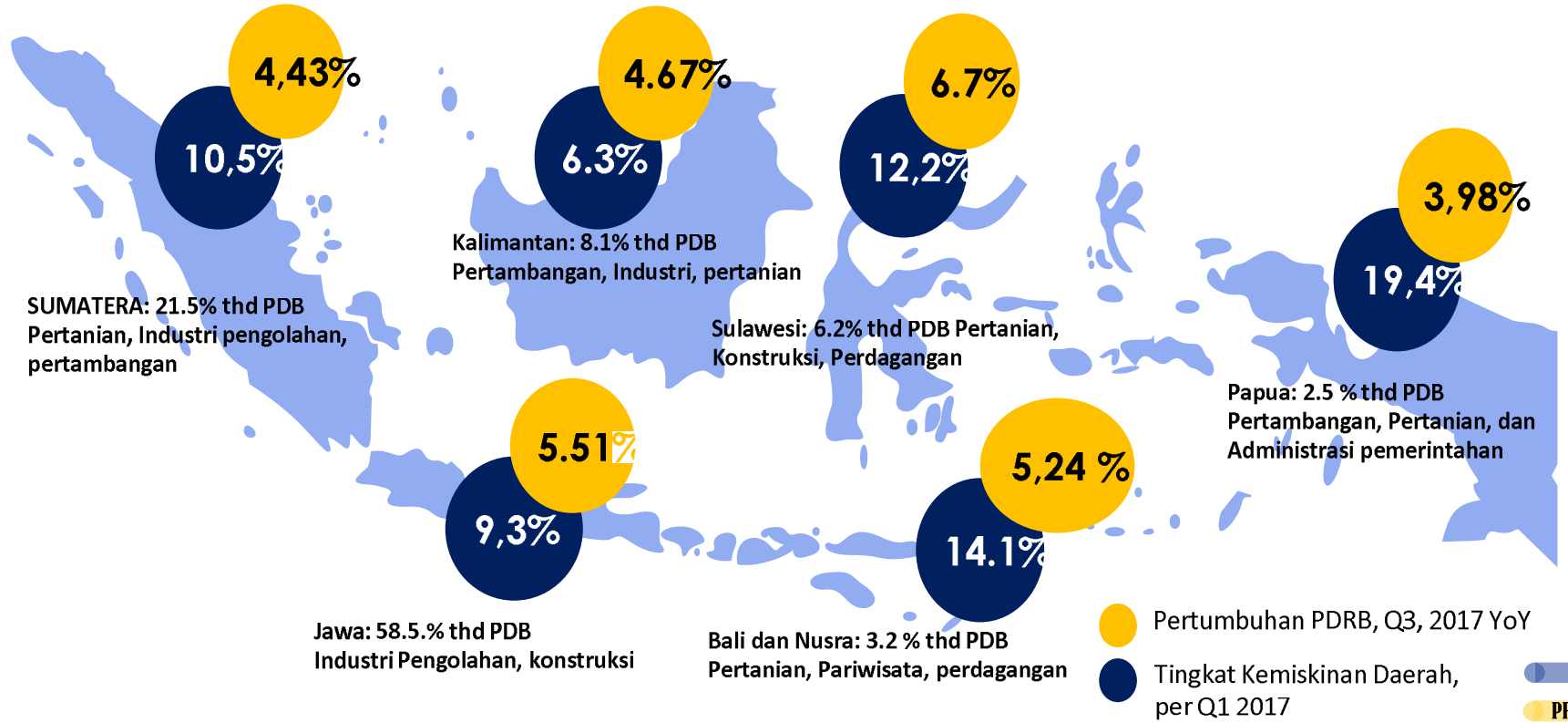


Ket: * data per semester I

TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENJADI NEGARA MAJU (1)



Ketimpangan (inequality) masih terjadi, tidak hanya antar kelompok masyarakat, Namun juga masih adanya disparitas antar pulau di wilayah Indonesia





Akses Air Bersih



Masih terjadi ketimpangan dalam penyediaan layanan publik antarwilayah

Rasio Tenaga Medis



- 15 per 100.000 Kota Banda Aceh
Prov. Aceh
- 1.4 per 100.000 Kab. Kupang
Prov. NTT

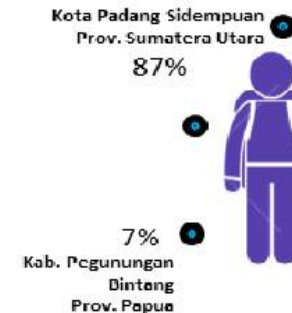
Akses Sanitasi



Gini Ratio



Partisipasi Sekolah hingga SMA

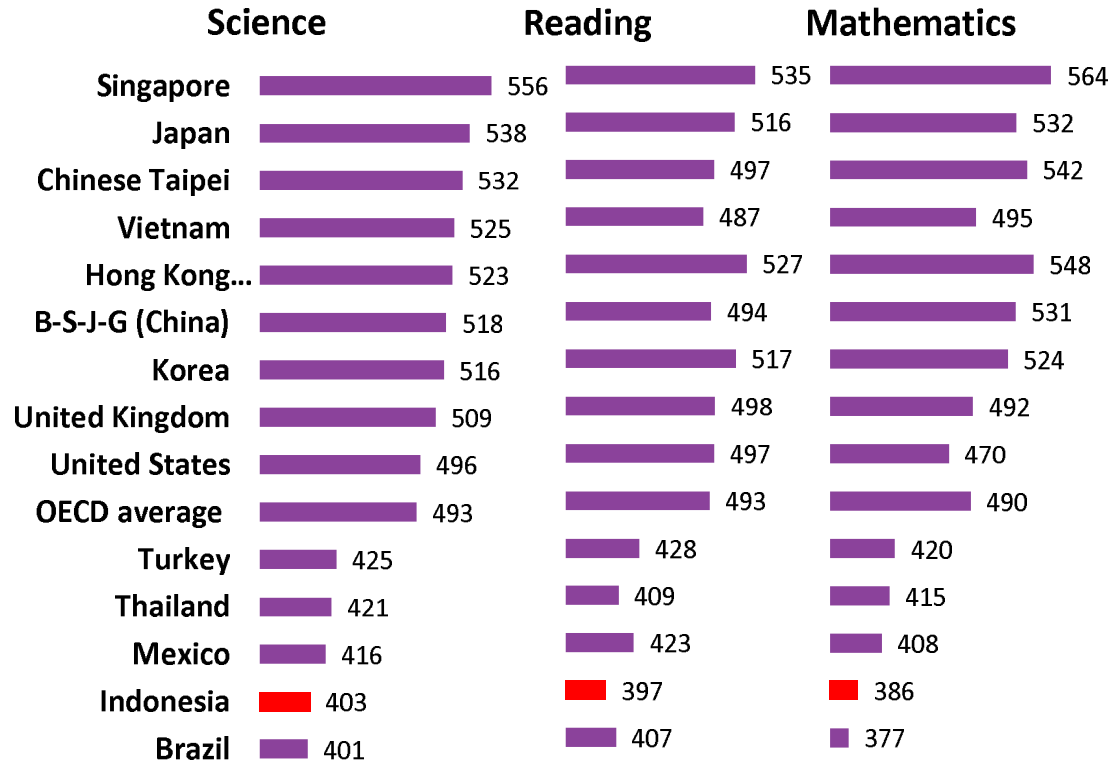


TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENJADI NEGARA MAJU (3)



PISA SCORE INDONESIA TERMASUK RENDAH

Programme for International Student Assessment Score (PISA)



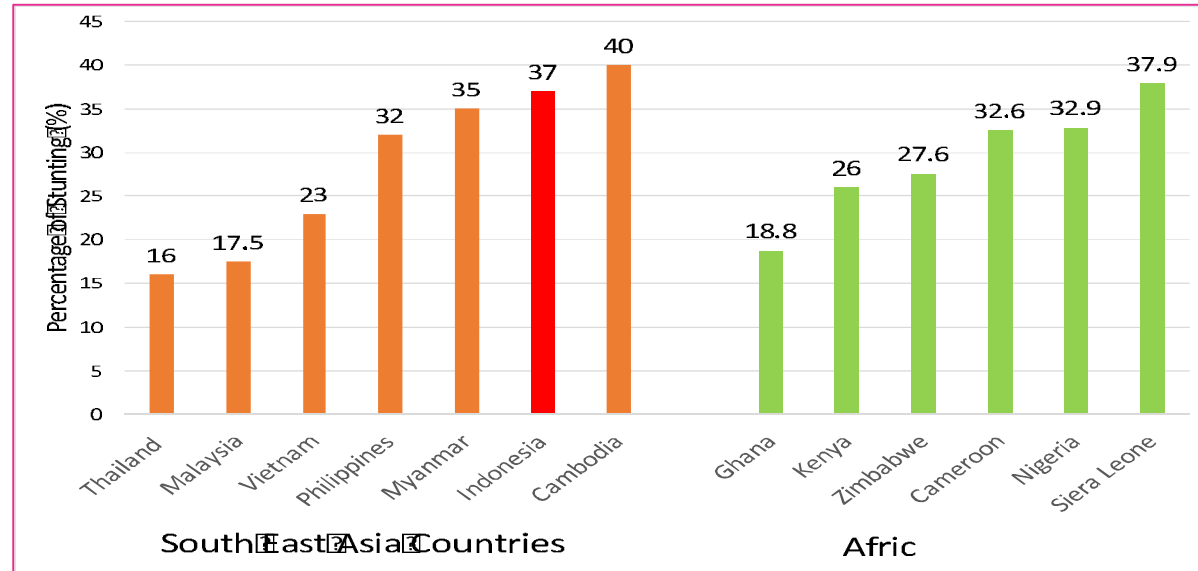
sumber : OECD

“The performance of Indonesian students (girls and boys) in science, mathematics and reading is one of the lowest among PISA-participating countries with an average ranking of 62 out of 69 countries”

TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK MENJADI NEGARA MAJU (4)



Malnutrisi pada balita masih merupakan permasalahan serius di Indonesia...



❑ Indonesia adalah satu dari 11 negara dengan kinerja terburuk dalam mengurangi masalah malnutrisi. (Global Nutrition Report, 2015)

❑ Malnutrisi menyebabkan *Stunting* pada balita. Saat ini tingkat *stunting* di Indonesia adalah tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Kamboja, bahkan lebih tinggi dari beberapa negara Afrika.

❑ Malnutrisi pada pada 1000 hari pertama usia balita menyebabkan perkembangan otaknya terhambat dan berpengaruh pada kualitas penyerapan pelajaran/pengetahuan di masa mendatang.

SINERGI KEBIJAKAN DI SEMUA SEKTOR

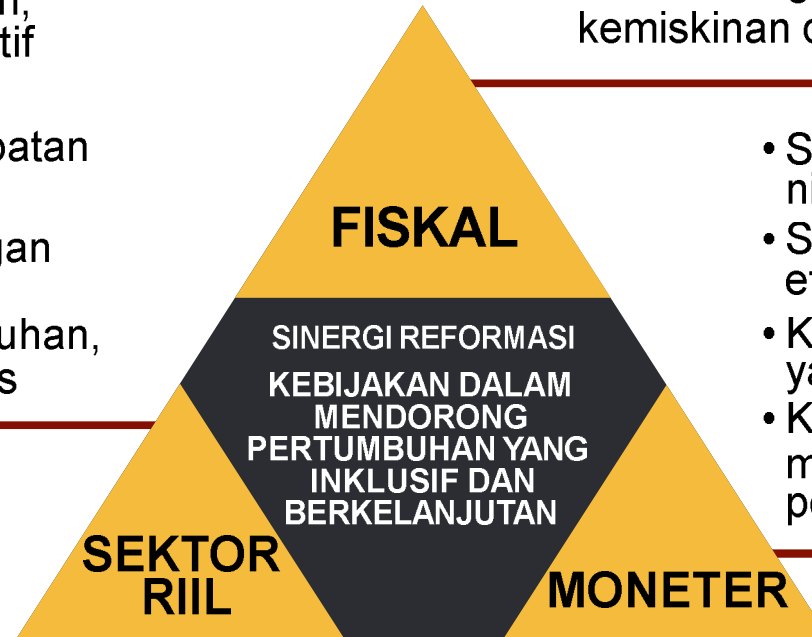


MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN INKLUSIF UNTUK MENGATASI TANTANGAN PEMBANGUNAN

- Sektor riil yang efisien, kompetitif, dan inovatif
- Sektor riil yang menciptakan kesempatan kerja
- Kebijakan perdagangan dan investasi yang mendukung pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas

- APBN yang berkeadilan, efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

- Stabilitas harga, inflasi, dan nilai tukar
- Sektor keuangan yang efisien dan sandal
- Kebijakan makroprudential yang efektif
- Kebijakan moneter yang mendukung growth dan pengurangan kemiskinan



APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN "MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR" (1)

TEMA RKP 2018

"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018

"Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan"

PENDAPATAN

OPTIMALISASI DAN REFORMASI PENERIMAAN NEGARA

- Optimalisasi Tax Ratio
- Kepabeanaan dan Cukai
- Pengelolaan SDA dan Aset

BELANJA

EFISIENSI DAN KUALITAS BELANJA PRIORITAS

- Penguatan kualitas belanja modal
- Efisiensi belanja non prioritas
- Sinergi antar program
- Menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan)
- Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam rangka :
 - Pengurangan Kemiskinan
 - Pengurangan Kesenjangan
 - Penciptaan Kesempatan Kerja

PEMBIAYAAN

KEBERLANJUTAN DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN

- Defisit dan rasio utang terkendali
- Keseimbangan primer menuju positif
- pengembangan creative

financing

APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN “MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR” (2)

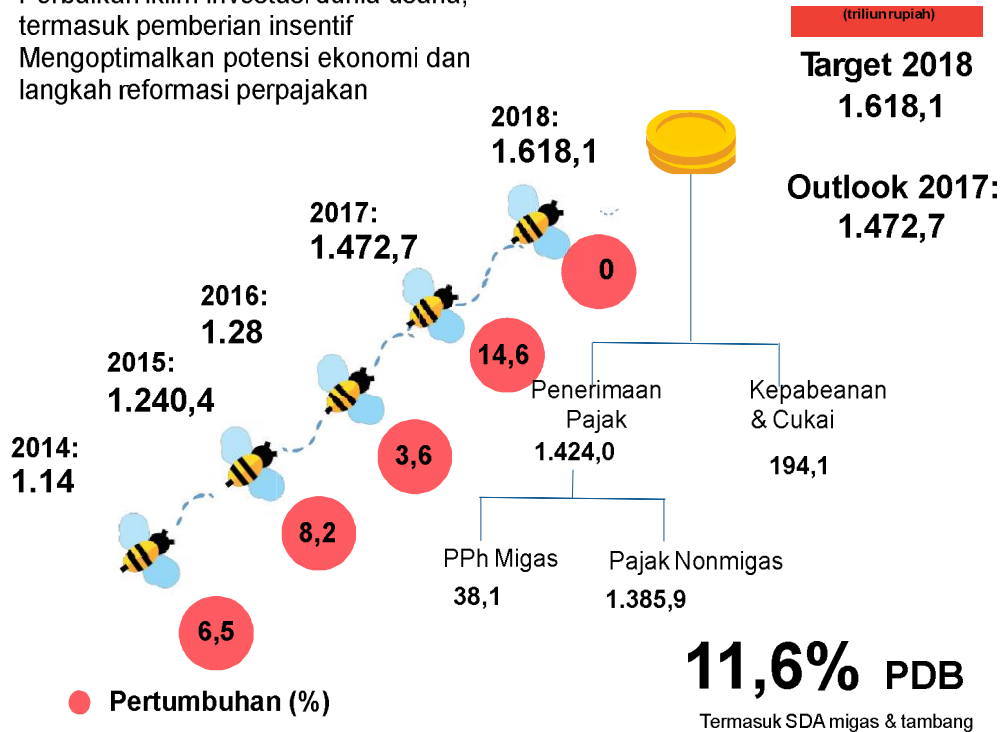
APBN sebagai stimulus perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan..

	2016	2017		2018		
	LKPP Realisasi	APBN-P	Realisasi 31 Oktober	% Realisasi Terhadap APBN-P	APBN	% Pertumbuhan dibandingkan APBN-P 2017
A. Pendapatan	1,555.90	1,736.10	1,238.2	71.3%	1,894.7	9.1%
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,546.90	1,733.00	1,235.5	71.3%	1,893.5	9.3%
1. Perpajakan	1,284.90	1,472.70	991.2	67.3%	1,618.1	9.9%
2. PNBPN	262	260.2	244.3	93.9%	275.4	5.8%
II. Hibah	9	3.1	2.7	87.2%	1.2	-61.3%
B. Belanja	1,864.30	2,098.90	1,537.1	73.2%	2,220.7	4.1%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,154.00	1,343.10	898.5	66.9%	1,454.5	6.4%
1. Belanja K/L	684.2	769.2	511.4	66.5%	847.4	9.6%
2. Belanja Non K/L	469.8	573.9	387.1	67.5%	607.1	2.2%
II. TKDD	710.3	755.9	638.6	84.5%	766.2	0.0%
C. Keseimbangan Primer	-125.6	-144.3	-115.8	65.1%	-87.3	-51.0%
D. Surplus	-308.3	-362.9	-298.9	82.4%	-325.9	-18.0%
% PDB	-2.49	-2.67	-2.2	82.38%	-2.19	
E. Pembiayaan	334.9	362.9	382.5	105.4%	325.9	-18.0%

PENERIMAAN PERPAJAKAN

PENERIMAAN PERPAJAKAN NAIK Rp8,7 T DARI RAPBN TAHUN 2018 (PPN Rp6,5 T. PPH MIGAS Rp2,2 T)

- Perbaiki iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif
- Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan



LANGKAH PERBAIKAN PERPAJAKAN



Automatic Exchange of Information (AEOI)

- meningkatkan basis pajak
- mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)



Data dan Sistem Informasi Perpajakan

up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.



Kepatuhan Wajib Pajak

membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.



Insentif Perpajakan

- tax holiday dan tax allowance
- reviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.

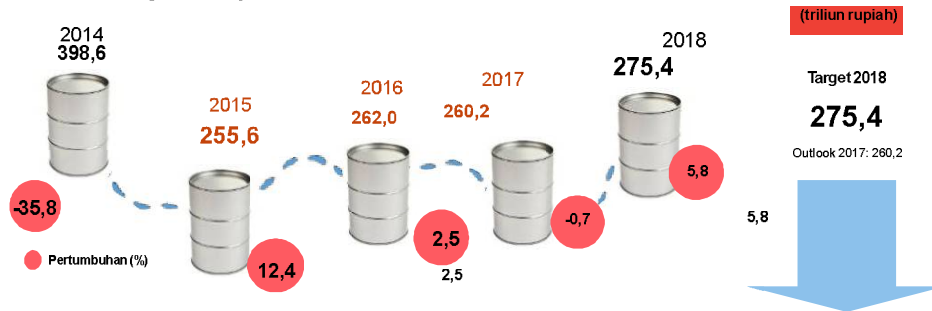


SDM dan regulasi

Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PNBP NAIK Rp7,6 T DARI RAPBN TAHUN 2018 (a.I. SDA MIGAS Rp3,2 T, SDA NON MIGAS Rp1,2 T, DAN PNBP LAINNYA Rp1,8 T)



DIDUKUNG LANGKAH EFISIENSI DAN PENGELOLAAN SDA, SERTA EFEKTIFITAS PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

Pendapatan SDA

103,7

SDA Migas	30,3
SDA Nonmigas	23,3
Minerba	17,9
Panas bumi	0,7
Kehutanan	4,2
Perikanan	0,6

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

44,7

Bagian Pemeliharaan atas Laba BUMN:	
Perbankan	10,9
Non Perbankan	33,8

PNBP Lainnya

83,8

3 K/L Terbesar:	
Kemkominfo	16,7
Polri	9,3
Kemenhub	7,3

Pendapatan BLU

43,3

3 K/L dengan Pendapatan BLU Terbesar:	
Kemenkeu	13,9
Kemendes	11,1
Kemennristek Dikti	6,6

Langkah Kebijakan PNBP



Penyempurnaan peraturan

Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.



Peningkatan Pengawasan pengelolaan

- Penyetoran sesuai penerimaannya
- Penagihan piutang
- Menindaklanjuti hasil audit



Optimalisasi PNBP

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA
- Peningkatan kinerja BUMN
- Efisiensi operasional PNBP
- Revisi kontrak dan efisiensi cost recovery
- Menggali potensi baru



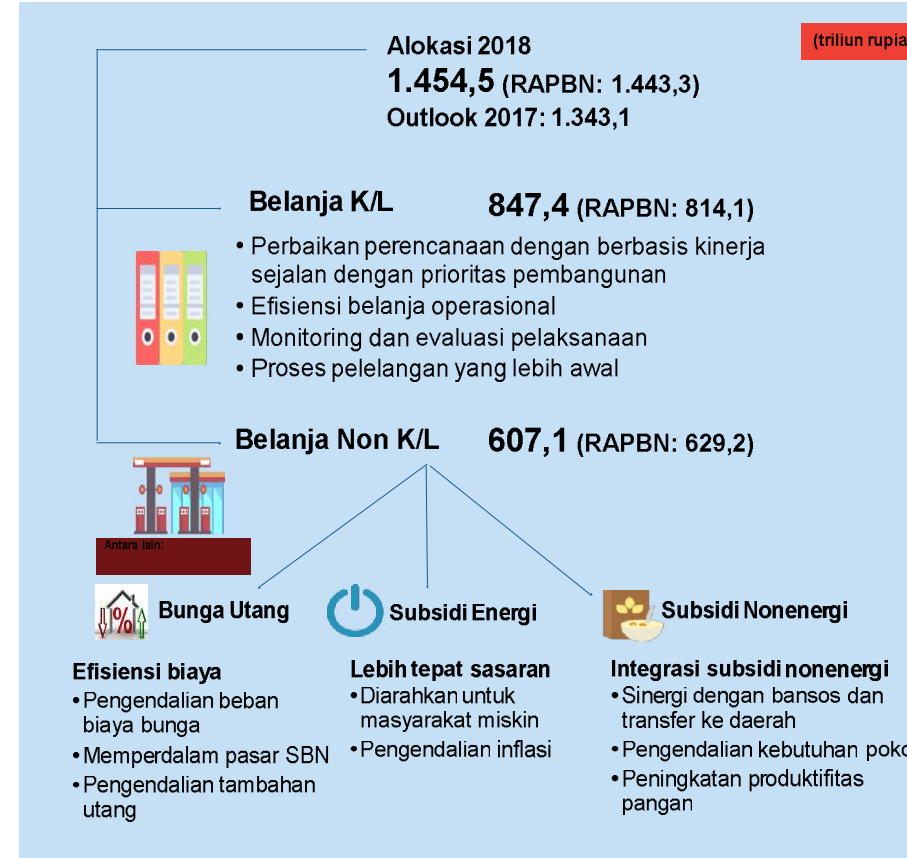
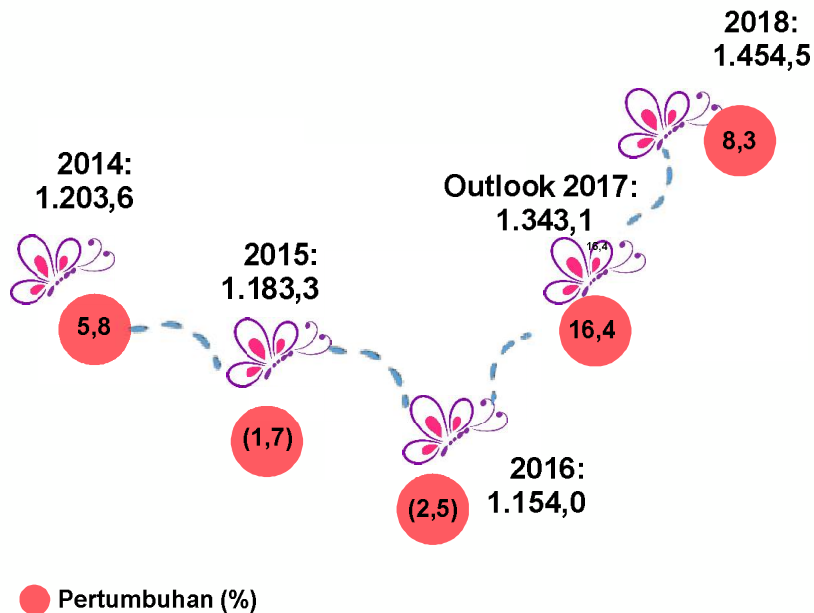
Perbaikan Pelayanan Publik

- Transparansi dan kemudahan
- Pemanfaatan IT
- Perbaikan pengelolaan PNBP

BELANJA NEGARA

BELANJA PEMERINTAH PUSAT NAIK Rp11,2 T DARI USULAN RAPBN TAHUN 2018 (KENAIKAN BELANJA K/L Rp33,4 T DAN PENURUNAN BELANJA NON K/L Rp22,2 T)

diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas



BELANJA PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

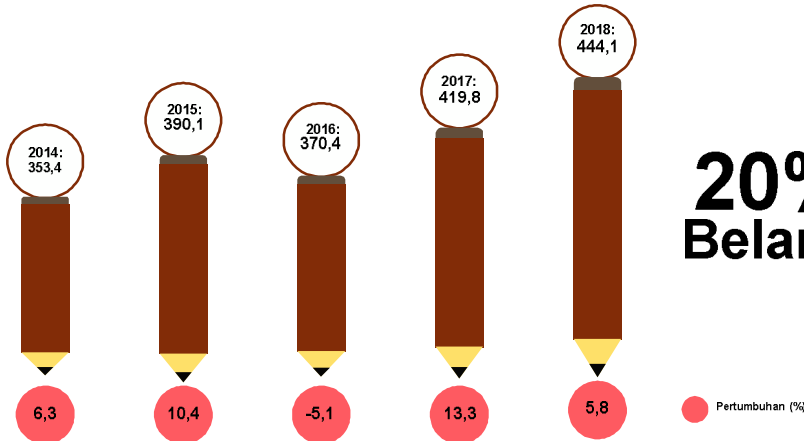
**BELANJA PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL NAIK, TERUTAMA BIDANG INFRASTRUKTUR Rp1,7 T
SERTA BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN DAN DEMOKRASI NAIK Rp19,2 T**

(triliun rupiah)

Kemiskinan dan Kesenjangan 283,7 ¹⁾	Infrastruktur 410,7 ²⁾	Sektor Unggulan 34,8 ³⁾	Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat 365,8 ⁴⁾	Pertahanan Keamanan dan Demokrasi 220,8 ⁵⁾
<p> Program perlindungan sosial (PKH) --> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat</p> <p> Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) : dari rastra</p> <p> Pelayanan Kesehatan : PBI 92,4 juta jiwa</p> <p> Pendidikan Program Indonesia Pintar : 19,7 juta siswa Bidik misi : 401,5 ribu mahasiswa</p> <p>1) Termasuk Dana Desa dan subsidi (di luar subsidi pajak)</p>	<p> Pembangunan Jalan 865 km</p> <p> Pembangunan Irigasi 781 km</p> <p> Pembangunan Rusun 13.405 unit</p> <p> Rasio Elektrifikasi 95,15 %</p> <p>2) Angka sementara, termasuk TkDD dan Pembiayaan</p>	<p> Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarpras • Pengembangan hortikultura <p> Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan 10 destinasi wisata • Peningkatan wisatawan • Promosi pariwisata <p> Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing produk olahan perikanan • Bantuan kapal nelayan 1048 unit • Kelestarian lingkungan <p>3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar</p>	<p> Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p> Kesejahteraan aparatur dan pensiunan</p> <p> Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri Rp5 ribu dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari</p> <p> Perbaikan sistem dan manfaat pensiun aparatur negara</p> <p>4) Termasuk pensiunan aparat pemda</p>	<p> Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan</p> <p> Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana</p> <p> Demokrasi Penyelenggaraan pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019</p> <p>5) Alokasi Kemenhan, Polri, KPU, dan Bawaslu</p>

ANGGARAN PENDIDIKAN

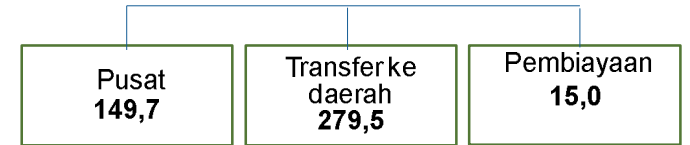
ANGGARAN PENDIDIKAN NAIK Rp3,2 T DARI USULAN RAPBN TAHUN 2018 UNTUK MENINGKATKAN AKSES, DISTRIBUSI, DAN KUALITAS PENDIDIKAN



Arah kebijakan

1. Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
2. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.
3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.
4. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match).
5. Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable education.
6. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Alokasi 2018 **444,1** (triliunrupiah)



Sasaran Target (sementara)

	Program Indonesia Pintar	19,7 Juta Jiwa
	Bantuan Operasional Sekolah	56 juta jiwa
	Beasiswa Bidik Misi	401,5 ribu mahasiswa
	Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas	61,2 ribu
	Tunjangan Profesi Guru	435,9 ribu guru
	• Non PNS	257,2 ribu guru
	• PNS	1,2 juta guru
	• PNSD	

Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	89,7% 88,1%	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	65,3 % 63,4%
--	----------------	--	-----------------

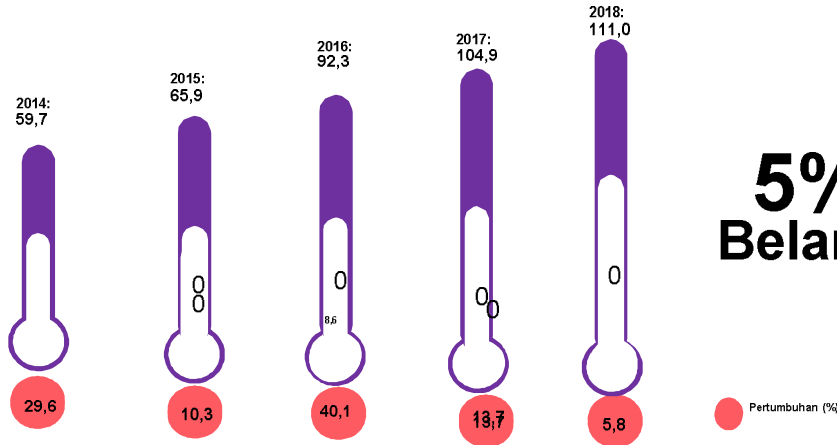
● 2017 ● 2018

- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNANAN

ANGGARAN KESEHATAN



ANGGARAN KESEHATAN NAIK Rp0,8 T DARI USULAN RAPBN TAHUN 2018 UNTUK MENINGKATKAN SUPPLY SIDE DAN LAYANAN, UPAYA KESEHATAN PROMOTIF PREVENTIF, SERTA MENJAGA KEBERLANJUTAN JKN



**5%
Belanja**

Arah kebijakan

1. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan.
2. Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.
3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.
4. Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan.



Sasaran Target	
 Program Indonesia Sehat	92,4 juta jiwa
 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	1,8 juta orang
 Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas	49 RS/Balkes
 Imunisasi untuk anak usia 0-11 bln	92,5%
 Sertifikasi obat dan makanan	74,0 ribu ²⁰¹⁷

Indikator Kesehatan

Stunting	28,8% 29,6%	Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	82% 81%
Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	86% 83%		

● 2017 ● 2018

- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAN

ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN DUKUNGAN PADA MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TERUS DIPERKUAT MELALUI PROGRAM BANTUAN SOSIAL, SUBSIDI, DAN DANA DESA

**Alokasi
2018
283,7**
(triliun rupiah)



Subsidi *)

145,5



PKH

17,3



Program
Indonesia
Pintar

10,5



JKN bagi
warga
miskin/PBI

25,5



Bantuan
Pangan

20,8



Bidik
Misi

4,1



Dana
Desa

60,0

*) diluar subsidi pajak

SASARAN (SEMENTARA)



Program Keluarga Harapan
10 juta RTS



Penerima Bantuan Iuran
dalam rangka JKN
92,4 juta jiwa



Program Indonesia Pintar
19,7 juta siswa



Bantuan Pangan
•15,6 juta Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM)

• Perluasan Bantuan pangan non tunai
(pengalihan dari subsidi rastra ke bansos)



Penyediaan Bantuan
Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif
117,7 rb KK



Dana Desa
74.958 Desa

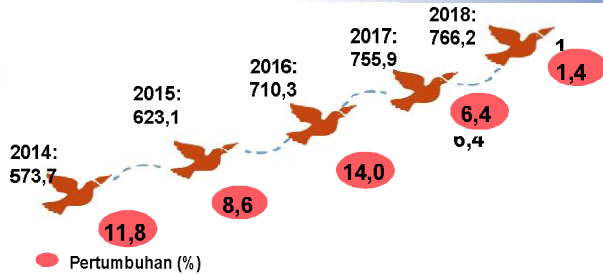
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Rp766,2 T



Fokus untuk :

- Meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah;
- Meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah;
- Menciptakan lapangan kerja; dan
-



DANA BAGI HASIL

Rp89,2 T

- Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional;
- DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; serta
- 25% untuk belanja infrastruktur.

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Rp62,4 T

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik;
- *Money follow* program;
- Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;
- Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan
- Sinkronisasi dengan belanja K/L.

DANA ALOKASI UMUM

Rp401,5 T

- Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah
- Pagu bersifat dinamis;
- Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan
- 25% untuk belanja infrastruktur.

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

Rp123,5 T

- Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik;
- Alokasi berdasarkan pada kebutuhan riil di daerah; dan
- Mendukung operasionalisasi layanan masyarakat di daerah

DANA OTSUS, DTI, DANA KEISTIMEWAAN DIY

Rp21,1 T

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

DANA DESA

Rp60,0 T

- Melakukan evaluasi pelaksanaan s.d. tahun 2017.
- Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk:
 - Pengerantasan kemiskinan.
 - Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa.
 - Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardaesa.
 - Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi

DANA INSENTIF DAERAH

Rp8,5 T

- Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

TARGET OUTPUT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK



DANA ALOKASI KHUSUS FISIK UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH



Pendidikan

1.Rehab Ruang Kelas:

- SD : 39,2 ribu unit
- SMP : 13,4 ribu unit
- SMA/K : 5,8 ribu paket

2.Alat peraga dan Buku:

- SD : 19,5 ribu unit
- SMP : 10,3 ribu unit
- SMA/K : 8,8 ribu paket

3.Ruang Kelas Baru :

- SD : 5,7 ribu unit
- SMP : 4,1 ribu unit
- SMA/K : 4,5 ribu paket

1. Pembangunan **127,5** ribu Sambungan untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat;

2. Pembangunan **1,7** ribu unit SPAL Terpusat;

3. Penyediaan sarana sanitasi individual perdesaan sebanyak **2,1** juta unit.



Sanitasi



Kesehatan

1. Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Puskesmas : **15,7** ribu unit
2. Alat kesehatan: RS dan Puskesmas : **26,4** ribu unit
3. Kefarmasian: **2,3** ribu paket.



Air Minum

1. Penyediaan sumber air minum layak bagi **510,4** ribu rumah tangga.
2. Penyediaan sumber air minum layak bagi **716,4** ribu rumah tangga melalui pembangunan **448** unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Penyediaan sumber air minum layak bagi **243,2** ribu rumah tangga



Irigasi & Pertanian

1. Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi seluas **51** ribu Ha.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 771,9 ribu Ha.
3. Perbaiki sumber air **8,2** ribu unit.
4. Jalan Usaha Tani **600** Km.



Perumahan

Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas **225,8** ribu rumah tangga.



Jalan

- Kemantapan Jalan:
- Provinsi sebesar 73,38 %
 - Kab/Kota sebesar 62,88%

SASARAN DAN TARGET DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK UNTUK PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA PELAYANAN PEMERINTAH.

(triliun rupiah)

● Bantuan Operasional Sekolah ► Rp46,7 T



Mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

47,43 juta siswa

● Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ► Rp4,1 T



Meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu.

6,18 juta peserta didik

● Bantuan Operasional Kesehatan ► Rp8,5 T



Meringankan beban pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan dinas kesehatan.

9.785 Puskesmas

● Bantuan Operasional KB ► Rp1,8 T



Operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

5.157 balai dan 24.312 faskes

● Tunjangan Profesi Guru ► Rp58,3 T



Meningkatkan profesionalisme guru.

1,23 juta guru

● Tambahan Penghasilan Guru ► Rp1,0 T



Meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru.

265 ribu guru

● Tunjangan Khusus Guru ► Rp2,1 T



Memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

50,1 ribu guru

● Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Ketenagakerjaan (PK2UKM) ► Rp0,1 T



Meningkatkan kapasitas SDM koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan.

23.545 peserta dan 1.500 pendamping

● Pelayanan Adminduk ► Rp0,8 T



Mendukung penyelenggaraan program dan pelayanan administrasi kependudukan.

34 Prov dan 508 Kab/Kota

PROFESIONALISM

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAN

KEBIJAKAN ALOKASI, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA

DIREFORMULASI UNTUK Mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan

REFORMULASI PENGALOKASIAN :

2017

Alokasi Dasar (AD)=90%
 + Alokasi Formulasi(AF)=10%
 Dengan Bobot:
 JP:JPM:LW:IKK=25:35:10:30

0,51

Rp19,2 triliun
 (31,9%)

- Rp8,4 triliun
- Rata-rata/Desa Rp0,76 miliar
- Alokasi Min Rp0,75 miliar
- Alokasi Max Rp2,02 miliar

2018

Alokasi Dasar (AD) = 77%
 + Alokasi Formulasi (AF) = 20%
 Bobot JP:JPM:LW:IKK = 10:50:15:25
 + Alokasi Afirmasi (AA) = 3%
 Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi

0,48

Rp22,1 Triliun
 (36,8%)

- Rp11,3 Triliun
- Rata-rata per Desa Rp1,15 Miliar
- Alokasi Min Rp0,84 Miliar
- Alokasi Max Rp3,42 Miliar

PRIORITAS PENGGUNAAN



PEMBANGUNAN DESA



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PRIORITAS PELAKSANAAN



TENAGA KERJA SETEMPAT



BAHAN BAKU LOKAL



SWAKELOLA

PENYALURAN

Berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output.

Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Desa di daerah Lainnya

Desa Tertinggal
 Rp587,0 ribu

Desa Sangat Tertinggal
 Rp1.182,3 ribu

Rp269,5 ribu

Alokasi Perkapita Dana Desa 2018

Keuangan Daerah:

- Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.



Tujuan:

- Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, produktif dan optimal;
- Pelaksanaan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab dan professional;
- Proses penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD yang transparan dan akuntabel; dan
- Peningkatan kualitas perencanaan dan disiplin anggaran.

Azas Umum APBD

- APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- APBD tidak boleh menyimpang dari APBN, artinya antara APBD dan APBN harus selaras dan sinkron.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan dalam APBD.



Prinsip-Prinsip APBD

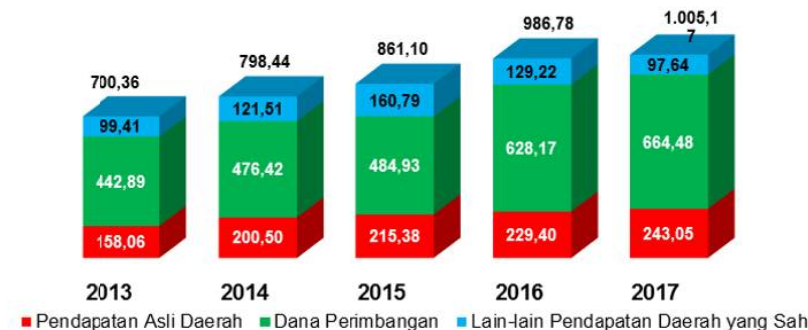
- Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
- Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBD.
- Melibatkan partisipasi masyarakat.
- Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (1): SEBAGIAN BESAR DAERAH MASIH SANGAT TERGANTUNG PADA DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM PENDAPATAN APBD

Dana Perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam pendapatan APBD kab/kota, sedangkan untuk provinsi kontribusi terbesar bersumber dari PAD.

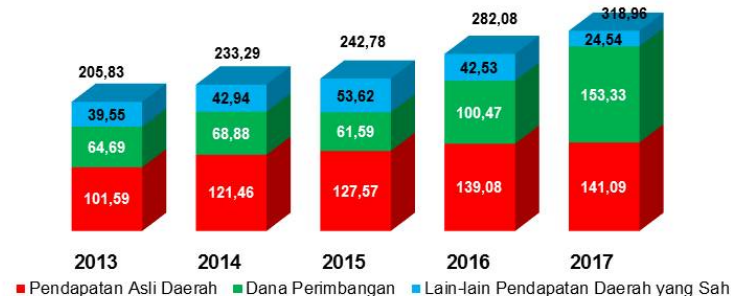
Nasional (Konsolidasi)

(dalam triliun)



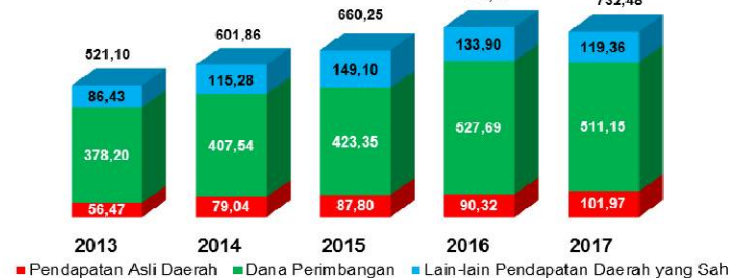
Provinsi

(dalam triliun)



Kab/kota

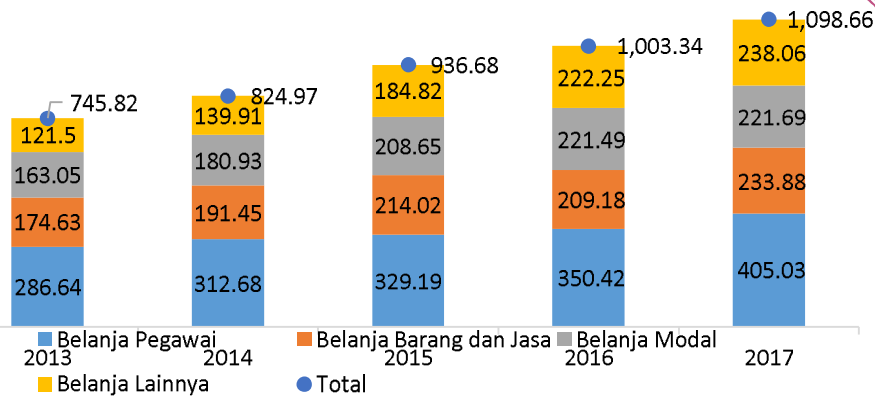
(dalam triliun)



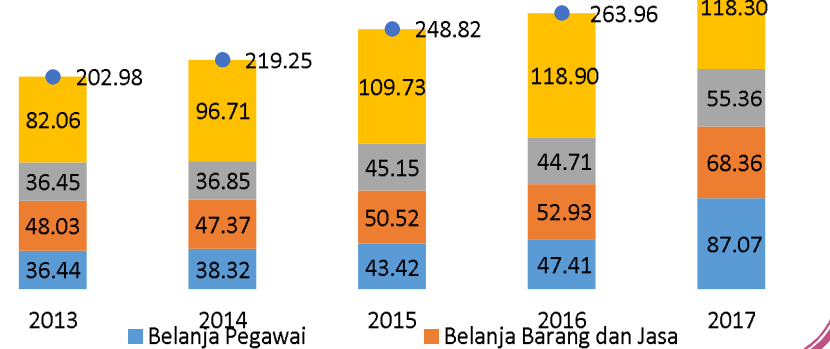
- Kontribusi Dana Transfer Ke Daerah terhadap pendapatan APBD Provinsi naik dari sebesar 21,5% pada tahun 2013 menjadi sebesar 48,1% tahun 2017
- Kontribusi Dana Transfer ke Daerah terhadap pendapatan APBD Kab./Kota turun dari sebesar 72,6% tahun 2013 menjadi sebesar 69,8% tahun 2017
- Peningkatan Kontribusi Dana Transfer ke Daerah dalam pendapatan APBD Provinsi karena meningkatnya alokasi DAU& DAK kepada Provinsi akibat pengalihan kewenangan dari Kab/Kota ke **Provinsi**

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (2): SEBAGIAN BESAR BELANJA APBD UNTUK BELANJA PEGAWAI

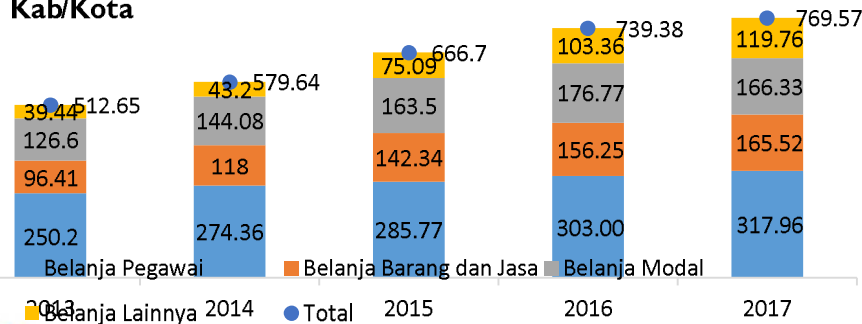
(dalam triliun)



PROVINSI



Kab/Kota



Sumber: Kemenkeu, diolah

- Porsi Belanja pegawai dalam APBD Provinsi naik dari 17,9% tahun 2013 menjadi 26,5% tahun 2017.
- Porsi Belanja pegawai dalam APBD Kab./Kota turun dari 48,8% tahun 2013 menjadi 41,3% tahun 2017
- Peningkatan porsi belanja pegawai Provinsi karena adanya pengalihan kewenangan dari Kab/Kota ke Provinsi

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (3): BELUM ADA STANDARISASI PROGRAM DAN KEGIATAN



Fakta

Terdapat 150-600 program pada satu daerah

Terdapat lebih dari 19.500 program & 277.700 kegiatan yang bervariasi antardaerah



Dampak

Anggaran tidak fokus terhadap prioritas daerah

Sulitnya sinkronisasi & harmonisasi Belanja APBD dengan program dalam belanja K/L

Fakta

Masih banyak K/L mendanai fungsi yang sudah menjadi kewenangan daerah, antara lain:

Belanja fungsi Pendidikan:
Rehab & penambahan ruang kelas (Rp3,1 T)

Belanja fungsi Ekonomi:
Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian (Rp467 M)

Belanja fungsi perlindungan sosial:
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan (Rp1,8 T)



Dampak

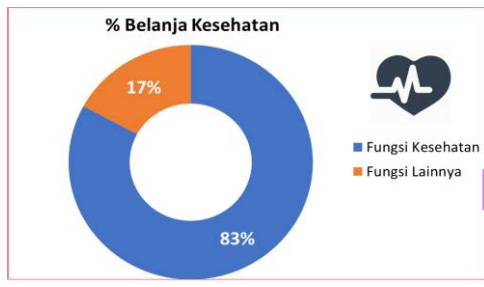
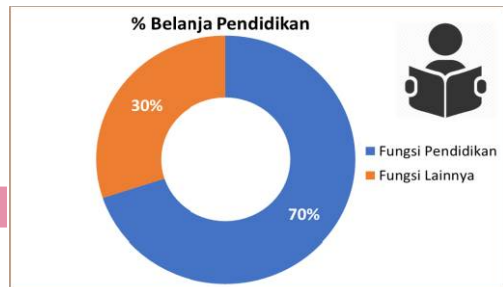
Tidak optimalnya penggunaan anggaran negara dalam menuntaskan program prioritas nasional dan daerah.

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (4): PEMENUHAN BELANJA MANDATORY TERKAIT LAYANAN PUBLIK BELUM OPTIMAL

Belum semua daerah memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai amanat Undang-Undang

✓ 400 Daerah telah memenuhi 20% belanja pendidikan.

✗ 142 Daerah belum memenuhi

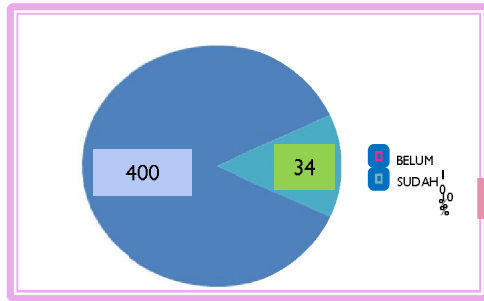
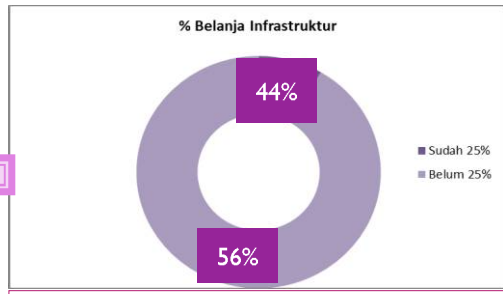


✓ 362 Daerah telah memenuhi 10% belanja kesehatan

✗ 180 Daerah belum memenuhi 10%

✓ 240 Daerah telah memenuhi belanja infrastruktur sebesar 25%

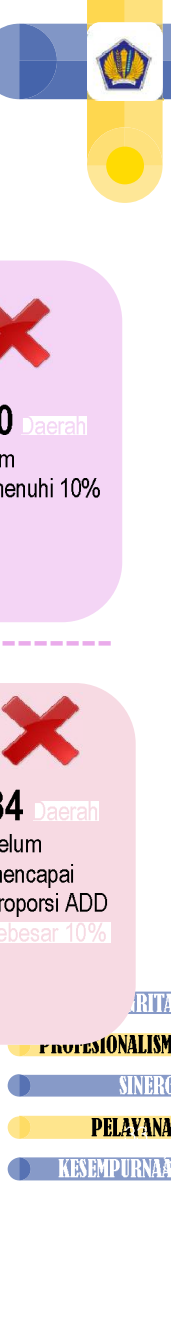
✗ 302 Daerah belum mencapai 25%



✓ 400 Daerah memiliki proporsi ADD sebesar 10%

✗ 34 Daerah belum mencapai proporsi ADD sebesar 10%

data per 1 Oktober 2017



Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (5): BELUM SEMUA DAERAH MENERAPKAN STANDAR BIAYA



Sebagian besar daerah belum memiliki Perda tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK).



Standar biaya daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan standar Pusat:

- ❖ jumlah anggota Tim cenderung banyak
- ❖ honorarium lebih tinggi **16-30%**.
- ❖ satuan biaya Perjadin lebih tinggi **11-62%**,
- ❖ komponen Uang Harian lebih tinggi **50%**.
- ❖ Satuan biaya rapat dan konsinyering lebih tinggi **23-68%**
- ❖ Belanja Kendaraan Dinas lebih tinggi dari SBM Pusat.



Harga satuan ditetapkan oleh **Kepala Daerah** dengan **Peraturan Kepala Daerah: Diskresi** Penetapan Standar Satuan Harga **menjadi celah** terjadinya **inefisiensi** anggaran bangunan konstruksi, melalui **mark-up** harga satuan dan **kolusi dengan kontraktor**.

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (6): BELUM SEMUA DAERAH MENERAPKAN E-GOVERNMENT



Implementasi e-planning, e-budgeting, dan e-procurement merupakan tantangan dan kebutuhan yang mendesak dan krusial dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan bebas dari korupsi.



Tingkat Penerapan di Daerah

Aplikasi Web Base

E-Planning baru digunakan **136** daerah,
E-Budgeting = **8** Daerah,
E-Procurement = **536** daerah,
Aplikasi Penatausahaan = **158** daerah.

Aplikasi terintegrasi

Hanya **6** Daerah menggunakan Aplikasi terintegrasi

Aplikasi Dekstop Base

Sebanyak **384** Daerah menggunakan Aplikasi Penatausahaan



Kendala Penerapan E-Government

- Regulasi yang belum memadai
- Aplikasi yang susah untuk diadopsi
- Belum adanya kriteria persyaratan dan output
- Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan terbatasnya SDM

Tantangan dan Masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (7): KESALAHAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Tata kelola keuangan daerah yang tidak transparan dan akuntabel menjadi rawan terhadap penyalahgunaan, penyelewengan, dan praktek-praktek koruptif

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

71

Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Provinsi

107

Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Kabupaten/Kota



Laporan Tahunan KPK, 2016



343

kepala daerah yang berperkara hukum di kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah

Data Kemendagri, Januari, 2016

16,050

Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi

Monopoli kekuasaan

Diskresi kebijakan

Lemahnya Akuntabilitas

Faktor Lainnya:

- biaya pemilukada langsung yang mahal;
- kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- kurang pemahannya peraturan; dan
- pemahaman terhadap konsep budaya yang salah

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (1)

Pengelolaan keuangan daerah perlu berpedoman pada prinsip-
good governance yang merupakan syarat penting (*necessary condition*) bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih (**clean government**) dan pro rakyat.

PRINSIP

TRANSPARANSI

PARTISIPASI

TERTIB & DISIPLIN

AKUNTABILITAS

- Memudahkan akses publik terhadap informasi.
- Penyebarluasan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

- Keterlibatan efektif masyarakat.
- Membuka ruang bagi peran serta masyarakat.

- Taat hukum.
- Tepat waktu, tepat jumlah.
- Sesuai prosedur.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

TRANSPARAN

AKUNTABEL

BERKUALITAS



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (2)



Transparan :

- Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berdasarkan e-government (e-planning, e-budgeting, e-procurement)
- Realisasi APBD dapat diakses oleh masyarakat
- Output hasil pelaksanaan APBD dapat diketahui oleh masyarakat.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah membutuhkan keterbukaan informasi dan integrasi Proses bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan.



E-Planning

Penerapan e-planning dalam tahapan



E-Budgeting

Penerapan e-budgeting dalam tahapan penyusunan RKA OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menggunakan sumber data dari e-



E-Procurement dan E-Katalog

Penerapan e-procurement dan e-katalog dalam tahapan pelaksanaan proyek dan kegiatan belanja daerah khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa

Implementasi **e-Government** di pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan transparansi dalam upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah

INTEGRITA

PROFESIONALISM

SINERG

PELAYANA

KESEMPURNA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (3)

Pengelolaan Keuangan daerah yang pro rakyat merupakan instrumen bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat

Pro-Rakyat:

1. Belanja fokus pada:

- Perluasan kesempatan kerja
- Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- Pengentasan kemiskinan
- Pengurangan ketimpangan antar kelompok masyarakat.
- Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Stream lining Belanja Pegawai & Operasional dan memperbesar porsi belanja produktif, belanja modal untuk infrastruktur publik dibandingkan dengan belanja pegawai.

3. Pemenuhan belanja wajib, yaitu:

- belanja pendidikan 20%
- kesehatan 10%
- infrastruktur 25% dari DAU dan DBH, dan
- Alokasi Dana Desa 10% dari DAU dan DBH

4. Penerapan *Value for Money* dalam perencanaan APBD

5. Perencanaan dan pelaksanaan difokuskan pada sedikit program dan kegiatan agar tuntas dalam satu tahun.

6. Penetapan Perda APBD secara tepat waktu.

7. Pelaksanaan belanja daerah (mulai dari proses pengadaan barang/jasa dan pembangunan) perlu lebih dipercepat setelah APBD ditetapkan agar dapat memberikan dampak dan manfaat ekonomi & sosial yang lebih besar kepada masyarakat.

8. Cash management yang efektif.

9. Pelibatan masyarakat didalam pelaksanaan proyek dan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, serta proses pelaksanaan keuangan Daerah.

10. Transparan dan Akuntabel, serta memperhatikan keadilan dan kepatutan.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (4)



VALUE FOR MONEY: utilitas yang diperoleh dari setiap rupiah uang yang dibelanjakan, baik dengan **meminimalkan dana APBD dan menarik sebanyak mungkin investasi swasta** maupun **mengoptimalkan dana APBD secara efektif dan efisien** untuk peningkatan

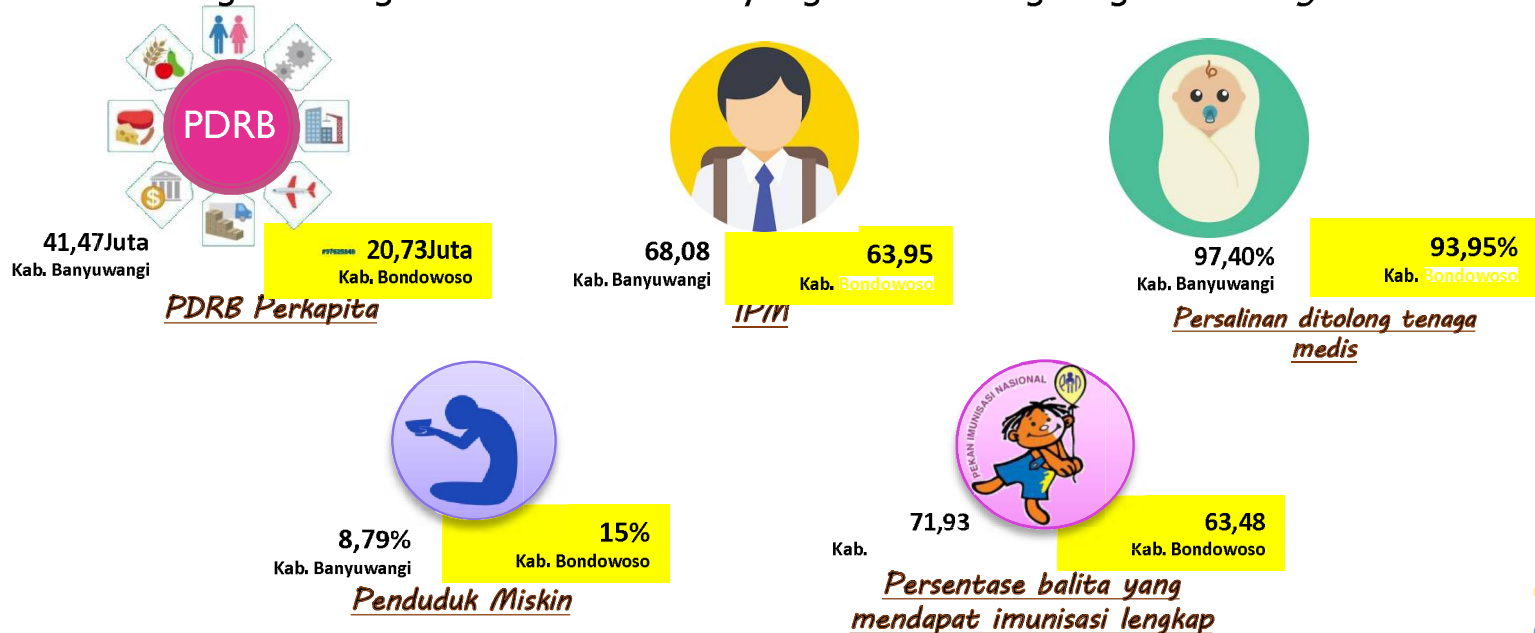
Perbandingan daerah dengan anggaran belanja yang sama, tapi komposisi dan output/outcome berbeda.

	Prov.Sumatera Barat	Prov.Kalimantan Barat	Kota Tangerang Selatan	Kab. Pasuruan
ANGGARAN	Rp4,7 Triliun		Rp3,3 Triliun	
Belanja Pegawai	26%	33%	33%	46%
Belanja Modal	41%	25%	40%	27%
OUTPUT/OUTCOME				
Harapan Lama Sekolah (Thn)	13,79	12,37	14,08	11,81
Persalinan dengan bantuan medis (%)	95,85	83,23	98,65	95,77
Akses Sanitasi Layak (%)	53,24	52,06	94,87	58,87
Akses Air Minum (%)	67,33	66,19	74,93	66,65
Penduduk Miskin (%)	7,31	8,03	1,69	10,72
IPM	70,73	65,88	80,11	65,71

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (5)

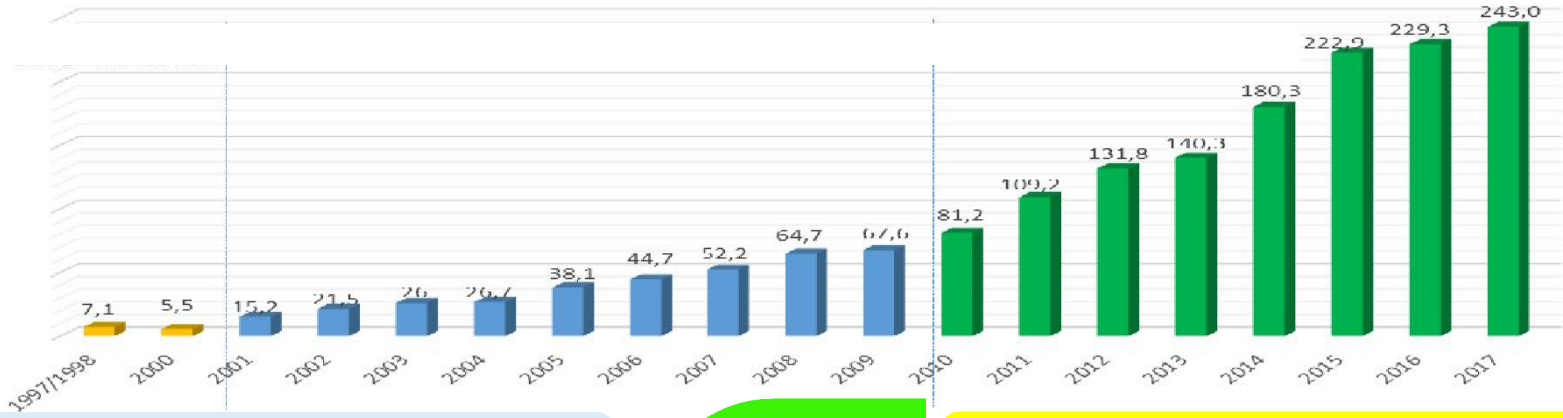
Integrasi e-government akan mendukung belanja APBD lebih fokus terhadap kepentingan rakyat...

Kab. Banyuwangi yang telah mengintegrasikan *e-government* dalam tata kelola keuangan daerah, menghasilkan capaian output/outcome yang lebih baik dibandingkan dengan Kab. Bondowoso yang belum mengintegrasikan *e-government*.



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (6)

Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2017), perlu optimalisasi penerimaan perpajakan daerah guna mendukung kemandirian fiskal daerah.



Peningkatan Basis Data Perpajakan



Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak



Koordinasi Pusat-Daerah untuk efektivitas Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan

STRATEGI OPTIMALISASI PAJAK DAERAH



Modernisasi



Peningkatan SDM



Menjaga Kemudahan Berusaha



INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (7)

Strategi mengatasi ketimpangan infrastruktur:

- peningkatan porsi belanja infrastruktur dalam APBD;
- penguatan sinergi skema pendanaan pembangunan infrastruktur, baik yang bersumber dari belanja K/L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maupun APBD; serta
- optimalisasi skema pembiayaan dengan Pinjaman dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Sumatera	
Air Minum Layak	61,34 %
Sanitasi Layak	60,92 %
Jalan Kondisi Mantap	59,01 %
Belanja Infrastruktur	Rp59,51 T
% dari APBD 2016	21,9 %

Kalimantan	
Air Minum Layak	63,89 %
Sanitasi Layak	55,84 %
Jalan Kondisi Mantap	60,33 %
Belanja Infrastruktur	Rp14,91 T
% dari APBD 2016	12,2 %

Sulawesi	
Air Minum Layak	66,36 %
Sanitasi Layak	64,11 %
Jalan Kondisi Mantap	53,61 %
Belanja Infrastruktur	Rp23,39 T
% dari APBD 2016	21,5 %

Maluku & Papua	
Air Minum Layak	56,67 %
Sanitasi Layak	46,69 %
Jalan Kondisi Mantap	44,72 %
Belanja Infrastruktur	Rp23,00 T
% dari APBD 2016	

Jawa	
Air Minum Layak	74,44 %
Sanitasi Layak	70,27 %
Jalan Kondisi Mantap	73,67 %
Belanja Infrastruktur	Rp65,76 T
% dari APBD 2016	15,5 %



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (8)

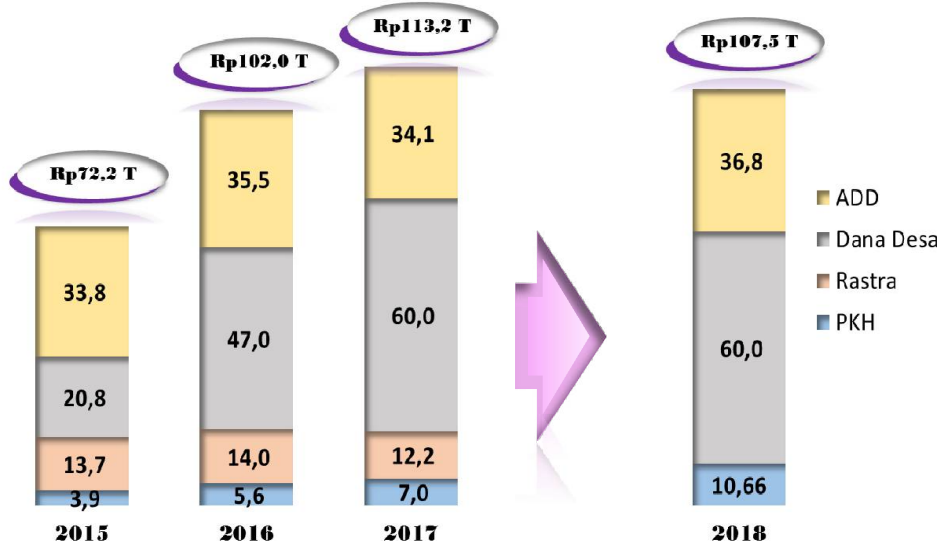


TENAGA KERJA SETEMPAT,

BAHAN BAKU LOKAL
pendapatan dan daya beli masyarakat, dan pengurangan kemiskinan

CASH FOR WORK

SWAKELOLA,
penciptaan lapangan kerja, peningkatan



Selama periode **2015-2017**,
Dana yang mengalir ke Desa
sudah mencapai **Rp287,44 T**

Anggaran ke desa TA 2018
Rp107,46T

**CASH
FOR
WORK**

Kriteria Kegiatan

- **Maksimal 5 kegiatan:** jalan desa, embung, jembatan, polindes, paud, pasar desa.
- Besaran upah:
 - **dibawah upah buruh tani** (Rp50.000);
 - minimal 30% dari dari nilai pekerjaan fisik
- Pelaksanaan kegiatan **tidak memerlukan alat berat/alat besar**
- Bentuk kegiatan: pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan; dan
- **tidak dilaksanakan bersamaan dgn masa panen;**

Target JPM 2018



2018
16,73 jt

44

INTEGRITA
PROFESIONALISM
SINERG
PELAYANA
KESEMPURNA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (9)



Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota perlu bersinergi dengan Pengusaha dalam mengembangkan potensi ekonomi di desa melalui KEMITRAAN EKONOMI DESA DAN PENGUSAHA untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan di desa.

POLA KEMITRAAN



Pengumpulan informasi

Penyebaran informasi

- Jenis produk unggulan desa
 - Lokasi desa
- Kapasitas produksi dan tingkat kualitas produk
 - Bahan baku produk
- Kelembagaan produsen di desa

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (10)

DID merupakan instrumen insentif bagi pemda dalam memacu pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, pelayanan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang optimal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kalimantan

Se-Provinsi	DID	DAERAH
Kalbar	143,0	8
Kalteng	267,0	11
Kalsel	331,0	13
Kaltim	122,3	5
Kaltara	69,5	2
Jumlah	932,8	39

Sulawesi

Se-Provinsi	DID	DAERAH
Sulteng	136,8	5
Sulut	293,3	13
Sulse	489,8	21
Sultra	201,8	10
Gorontalo	154,3	5
Sulbar	190,5	6
Jumlah	1.466,3	60

Maluku dan Papua

Se-Provinsi	DID	DAERAH
Maluku	108,5	4
Papua	84,8	5
Malut	135,5	5
Papua Barat	60,5	3
Jumlah	389,3	17

Sumatera

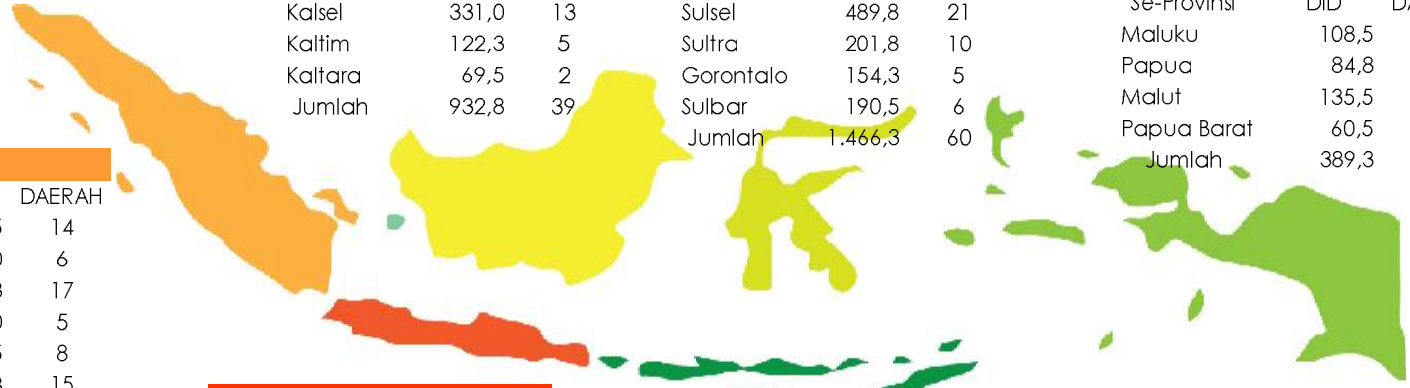
Se-Provinsi	DID	DAERAH
Aceh	421,5	14
Sumut	129,0	6
Sumbar	405,3	17
Riau	154,0	5
Jambi	220,5	8
Sumsel	396,8	15
Bengkulu	36,0	2
Lampung	277,3	11
Babel	49,8	3
Kepri	59,0	2
Jumlah	2.149,0	83

Jawa

Se-Provinsi	DID	DAERAH
DKI Jakarta	-	0
Jabar	582,0	20
Jateng	806,0	30
DIY	236,8	6
Jatim	995,3	31
Banten	148,0	5
Jumlah	2.768,0	92

Bali, NTB, dan NTT

Se-Provinsi	DID	DAERAH
Bali	445,5	10
NTB	305,3	10
NTT	44,0	2
Jumlah	794,8	22



KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

KESIMPULAN

- ❑ Anggaran yang dikelola daerah dari tahun ke tahun **semakin meningkat**, namun pengelolaannya masih perlu ditingkatkan agar **lebih efisien, efektif, produktif, dan optimal**.
- ❑ Banyak **tantangan dan permasalahan** pengelolaan keuangan daerah yang masih dihadapi oleh daerah, mulai dari **perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan**.
- ❑ Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara **profesional** dan mengedepankan prinsip-prinsip **good governance** dan **clean government**, serta berorientasi pada **output/outcome** untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

TINDAK LANJUT

- ❑ Memperbaiki proses perencanaan anggaran dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar kegiatan, program dan sumber pendanaan secara **ketersinambungan**.
- ❑ Mempercepat penyelesaian pembahasan dan persetujuan APBD sebelum TA baru.
- ❑ Melakukan *Refocusing* anggaran dengan:
 - Mengurangi anggaran untuk belanja yang tidak produktif dan fokus terhadap belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - Fokus hanya pada 1 atau 2 program prioritas untuk menuntaskan suatu program tertentu pada suatu tahun anggaran, dan beralih pada prioritas lain pada tahun-tahun berikutnya.
- ❑ Implementasi e-Government di pemerintah daerah, meliputi *E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement*.
- ❑ Mempercepat pelaksanaan kegiatan belanja APBD dan penyerapan.
- ❑ Melakukan standarisasi program dan kegiatan.
- ❑ Menyusun APBD mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
- ❑ Memasukkan ketentuan untuk penyusunan perkara tentang standar biaya masukan, standar biaya keluaran dan standar satuan harga dalam perda APBD.

Thank You!

